

# PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

# LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2019

Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu,  
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya

e-mail : [pa.sungairaya@gmail.com](mailto:pa.sungairaya@gmail.com)



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

**Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung,  
Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya**

**Telp. 0561-6718903 Fax. 0561-6717768**

**e-mail : pa.sungairaya@gmail.com**

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungai Raya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungai Raya, 30 Juni 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

GALIH TRIATMOJO, S.E.  
NIP. 198102142006041003

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan .....	5
II. Neraca Perbandingan.....	6
III. Laporan Operasional .....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
A.1. Dasar Hukum.....	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungai Raya .....	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
A.4. Basis Akuntansi .....	12
A.5. Dasar Pengukuran .....	12
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan .....	20
B.2. Belanja.....	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca .....	23
C.1. Aset Lancar.....	23
C.2. Aset Tetap .....	25
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	28
C.4. Aset Lainnya .....	28
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	30
C.6. Ekuitas.....	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	31
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	31
D.2. Beban Pegawai.....	31

D.3.	Beban Persediaan .....	32
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	32
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	32
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	33
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	33
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	33
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	34
D.11.	Beban Lain-lain.....	34
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	34
D.13.	Pos Luar Biasa .....	35
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
E.1.	Ekuitas Awal .....	36
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	36
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset.....	36
E.4.	Koreksi Nilai Persediaan .....	36
E.5.	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	36
E.6.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	36
E.7.	Koreksi Lain-Lain.....	36
E.8.	Anggaran Yang Lalu.....	36
E.9.	Transaksi Antar Entitas.....	36
E.10.	Ekuitas Akhir.....	36
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	38
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	38
F.2.	Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI .....	38
F.3.	Pengungkapan Lain-lain .....	38

LAMPIRAN

Laporan-Laporan Pendukung

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

## Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan T A 2018.....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	2
Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	5
Tabel 4 Neraca per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	6
Tabel 5 Laporan Operasional per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	7
Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	8
Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang .....	15
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	17
Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	18
Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBK per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 .....	20
Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2019 .....	20
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	21
Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	21
Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	22
Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	22
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	23
Tabel 17 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	23
Tabel 18 Rincian Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> ) per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	24
Tabel 19 Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	24
Tabel 20 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	25
Tabel 21 Rincian Saldo Tanah.....	25
Tabel 22 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	26
Tabel 23 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan .....	26
Tabel 24 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	27
Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	27
Tabel 26 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	28
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	28

Tabel 28 Mutasi Aset Tak Berwujud .....	29
Tabel 29 Mutasi Aset Lain-Lain.....	29
Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	30
Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	30
Tabel 32 Perbandingan Rincian Pendapatan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	31
Tabel 33 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	31
Tabel 34 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	32
Tabel 35 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	32
Tabel 36 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	33
Tabel 37 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	33
Tabel 38 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	34
Tabel 39 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018....	35
Tabel 40 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	37
Tabel 41 Rincian Revisi Anggaran per 30 Juni 2019.....	39

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Raya, 30 Juni 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

GALIH TRIATMOJO, S.E.  
NIP.198102142006041003



## Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 27.211.600.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.750.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.750.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	0	27.211.600	0%	0	0	0%
Belanja Negara	1.750.000	1.750.000	100%	0	0	0%

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 0, dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0. Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2019	30 Juni 2018	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	0	0	0	0%
Aset Tetap	0	0	0	0%
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0%
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	0	0	0	0%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 27.211.600, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.750.000, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 25.461.600. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 25.461.600.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 25.461.600 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp. 25.461.600) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 0.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019. Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LRA Perbandingan

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2019 Dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1						
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	27.211.600	0%	0	0	0%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	27.211.600	0%	0	0	0%
B. Belanja Negara	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0%	0	0	0%
2. Belanja Barang	B.2.2	1.750.000	1.750.000	100%	0	0	0%
3. Belanja Modal	B.2.3	0	0	0%	0	0	0%
Jumlah Belanja Negara		1.750.000	1.750.000	100%	0	0	0%

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## II. Neraca Perbandingan

Tabel 4. Neraca per 30 Juni 2019 Dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)	C.1.2	0	0
Persediaan	C.1.3	0	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2.3	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	0	0
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Tak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-Lain	C.4.2	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	0	0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6	0	0
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

### III. Laporan Operasional

Tabel 5. Laporan Operasional per 30 Juni 2019 Dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	27.211.600	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>27.211.600</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.750.000	0
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	0	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.750.000</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>25.461.600</b>	<b>0</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.12		
Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.13		
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>		<b>25.461.600</b>	<b>0</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2019 Dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	25.461.600	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-Lain	E.7	0	0
Anggaran Yang Lalu	E.8	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	(25.461.600)	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.9.1	1.750.000	0
Diterima dari Entitas Lain	E.9.2	(27.211.600)	0
Transfer Keluar	E.9.3	0	0
Transfer Masuk	E.9.4	0	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		0	0
EKUITAS AKHIR	E.10	0	0

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagian Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapanta Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungai Raya

Visi Pengadilan Agama Sungai Raya merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 s.d 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Sungai Raya. Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan.
2. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sungai Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Sungai Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan karir pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya di bidang tugasnya masing-masing.
- b. Meningkatnya minat dan kemauan pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga berorientasi kepada hasil (indikator persentase peningkatan etos kerja).
- d. Meningkatnya keseragaman pola administrasi dan manajemen peradilan di semua lingkungan peradilan.
- e. Meningkatnya akurasi data dan statistik, mulai dari penyusunan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, termasuk pemanfaatan teknologi dengan penerapan aplikasi yang lebih canggih.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4.) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(5.) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



### c. Penyusunan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah,
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### **(7.) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Realisasi  
Pendapatan Rp.  
27.211.600

### B.1 Pendapatan

#### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2019 sebesar Rp. 27.211.600 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan	
				Rp	%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	0	10.000	0%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	483.000	0	483.000	0%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	16.110.000	0	16.110.000	0%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.608.600	0	10.608.600	0%
<b>Jumlah Pendapatan Netto</b>		<b>27.211.600</b>	<b>0</b>	<b>27.211.600</b>	<b>0%</b>

### B.2 Belanja

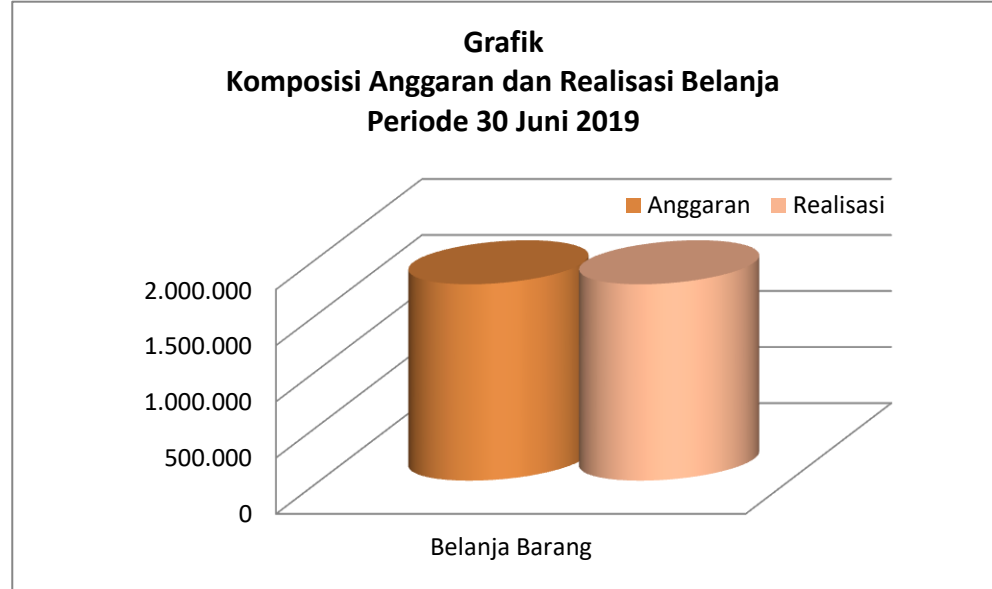
Realisasi  
Belanja  
Negara Rp.  
1.750.000

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Sungai Raya pada periode 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 1.750.000 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.750.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019  
(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.750.000	1.750.000	100%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>100%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2019 belum bisa dibandingkan dengan realisasi periode 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena satuan kerja Pengadilan Agama Sungai Raya baru pertama kali menerima DIPA di Tahun 2019 ini.

Adapun perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018 (dalam rupiah)**

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	Rp	%
52	Belanja Barang	1.750.000	0	1.750.000	0%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0%</b>

*Belanja Pegawai Rp. 0*

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Adapun perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 13. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 (dalam rupiah)**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0	0%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0	0%

Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0	0	0%
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Umum PNS	0	0	0	0%
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	0	0	0	0%
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	0	0	0	0%
Pengembalian	0	0	0	0%
Realisasi Belanja Pegawai Netto	0	0	0	0%

### B.2.2 Belanja Barang

Belanja  
Barang Rp.  
1.750.000

Realisasi Belanja Barang sampai dengan periode 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.750.000 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Barang ini telah terserap sebesar 100% dari total anggaran. Adapun perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.750.000	0	1.750.000	0%
Realisasi Belanja Barang Bruto	1.750.000	0	1.750.000	0%
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Barang Netto	1.750.000	0	1.750.000	0%

### B.2.3 Belanja Modal

Belanja  
Modal  
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal sampai dengan periode 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Adapun perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0%
Realisasi Belanja Modal Bruto	0	0	0	0%
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Modal Netto	0	0	0	0%

## C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

### C.1 Aset Lancar

Aset Lancar  
Rp. 0

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sungai Raya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Rincian Aset Lancar Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)	0	0
3	Persediaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 17. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar  
Dimuka (Prepaid)  
Rp.0

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 18. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	Belanja Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.3 Persediaan

Persediaan Rp. 0

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan Lainnya	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nilai persediaan di atas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan tanggal 30 Juni 2019. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp. 0 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.



Aset Tetap  
Rp.0

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada Pengadilan Agama Sungai Raya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 20. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2.1 Tanah

Tanah  
Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Sungai Raya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0.

Rincian Aset Tetap berupa tanah pada Pengadilan Agama Sungai Raya disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 21. Rincian Saldo Tanah**  
(dalam rupiah)

<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
<b>Saldo per 30 Juni 2019</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>0</b>

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin  
Rp. 0

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 22. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan  
Bangunan  
Rp.0

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 23. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp.0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0

Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap  
Lainnya Rp.0

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Sungai Raya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud**  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

#### C.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp.0

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada mutasi aset lain-lain pada Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2019.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama

Sungai Raya serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain  
(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp.0

### C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp.0

### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Langganan Internet	0	-
2	Belanja Langganan Listrik	0	-

3	Belanja Langganan Telepon	0	-
4	Belanja Langganan Air	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp.0*

### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 0 dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas  
Rp.0*

### C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 0 dan Rp.0.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP  
Rp. 27.211.600

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 27.211.600 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 32. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
(425231) Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	0	10.000	0%
(425232) Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	483.000	0	483.000	0%
(425233) Pendapatan Ongkos Perkara	16.110.000	0	16.110.000	0%
(425239) Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.608.600	0	10.608.600	0%
<b>Total Pendapatan</b>	<b>27.211.600</b>	<b>0</b>	<b>27.211.600</b>	<b>0%</b>

Beban Pegawai  
Rp. 0

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 33. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0%
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Umum PNS	0	0	0	0%
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	0	0	0	0%
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Beban  
Persediaan  
Rp. 0

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Persediaan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0%
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp. 1.750.000

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.750.000 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa ialah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Barang dan Jasa		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.750.000	0	1.750.000	0%
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0%</b>

### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan Rp.  
0

Beban pemeliharaan yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 36. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Pemeliharaan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0%
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp. 0

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Perjalanan Dinas		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0%
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Beban Barang  
Untuk Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat  
Rp. 0

## D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan  
Sosial  
Rp. 0

## D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko social dan bersifat selektif.

## D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 (dalam rupiah)**

Uraian	Beban Penyusutan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0%
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## D.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain  
Rp.0

Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## D.12 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp.0

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

adalah sebagai berikut:

**Tabel 39. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Penyusutan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0%
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0%
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### D.13 Beban Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa  
Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Beban Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal  
Rp. 0*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.2 Surplus/Defisit LO

*Surplus/Defisit  
LO Rp.  
25.461.600*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 25.461.600 dan Rp. 0. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

### E.3 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp. 0*

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.4 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp. 0*

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp. 0*

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Non  
Revaluasi  
Rp. 0*

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.7 Koreksi Lain-lain

*Koreksi lain-lain  
Rp. 0*

Jumlah Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### E.8 Anggaran Yang Lalu

*Anggaran Yang  
Lalu  
Rp. 0*

Jumlah Anggaran Yang Lalu untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## E.9 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas  
Rp.  
(25.461.600)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. (25.461.600) dan Rp. 0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 40. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.750.000
2	Diterima dari Entitas Lain	(27.211.600)
3	Transfer Keluar	0
4	Transfer Masuk	0
Jumlah		(25.461.600)

### E.9.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain  
Rp. 1.750.000

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019 nilai DKEL sebesar Rp. 1.750.000.

### E.9.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain  
Rp.  
(27.211.600)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019 nilai DDEL sebesar Rp. (27.211.600).

### E.9.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar  
Rp. 0

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

### E.9.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk  
Rp. 0

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0.

## E.10 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir  
Rp. 0

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2019 pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019.

### F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak ada temuan dari BPK RI selama Tahun Anggaran 2019.

### F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya adalah:
  - 1) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 0071-01-002997-30-1 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964 telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN Pontianak nomor S-4755/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.
  - 2) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 0071-01-002999-30-3 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 403425, telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN Pontianak nomor S-4755/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0,00.
  - 3) PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Kas Kuala Dua, Nomor Rekening 2018110997 a.n. RPL 042 PDT PA SUNGAI RAYA UTK PERKARA, telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari KPPN Pontianak nomor S-3746/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 05 November 2018 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp. 40.693.000,00.
  - 4) Sedangkan Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya dan telah ditutup tidak ada.

## 2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2019 bernomor: DIPA-005.04.2.403425/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 dilakukan revisi anggaran ke Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat terkait revisi akun target pendapatan di mana pada DIPA sebelumnya masih menggunakan akun pendapatan lama. Adapun rincian perubahan tiap-tiap akun pendapatan yang direvisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

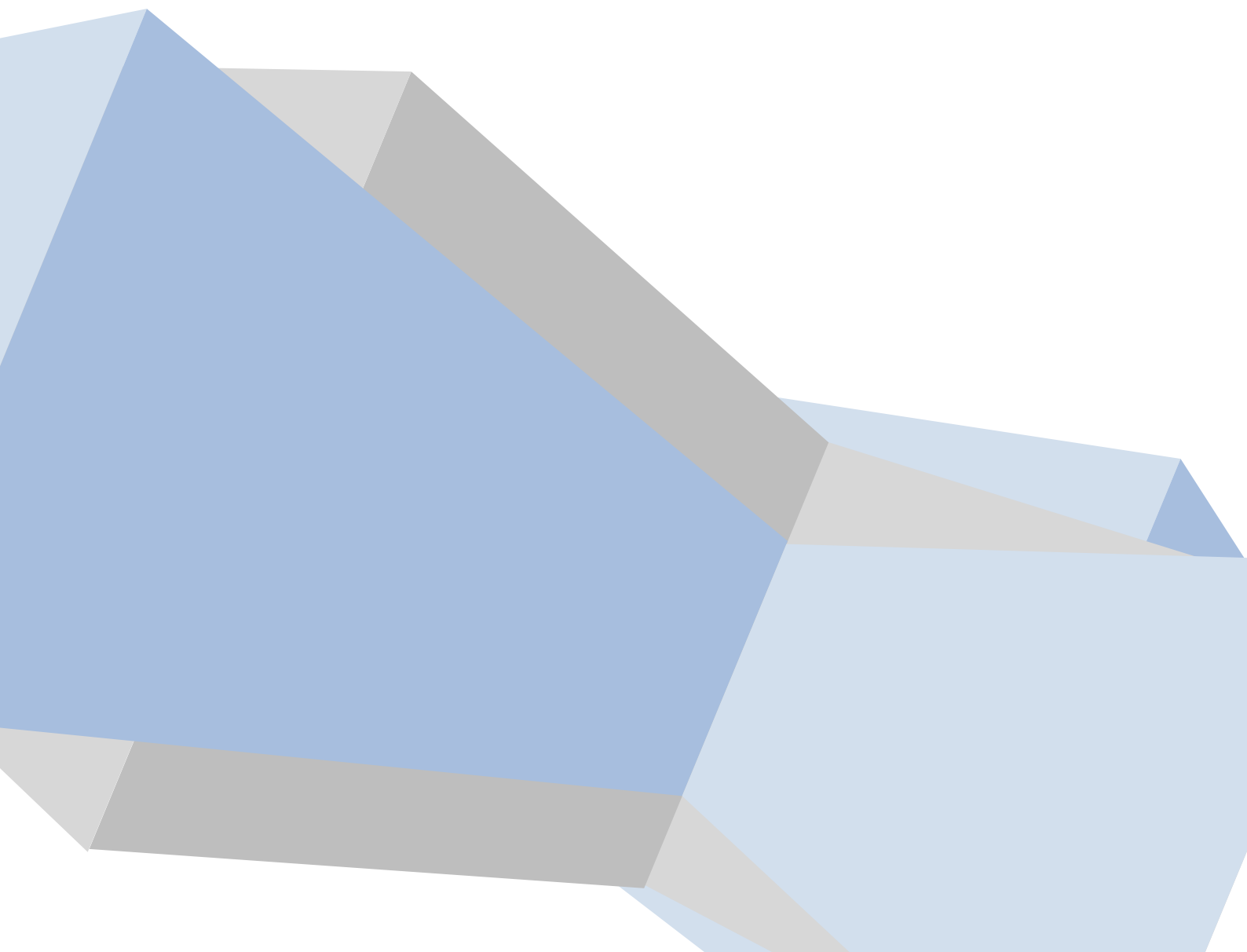
**Tabel 41. Rincian Revisi DIPA per 30 Juni 2019**  
(dalam rupiah)

Program dan Kegiatan	Kode Akun Pendapatan	Target Pendapatan	Revisi 1 Tgl. 24 Juni 2019
005.04.08			
1053.003	423411	300.000	Dihapus
	423413	2.100.000	Dihapus
	423415	25.000.000	Dihapus
	423419	15.000.000	Dihapus
	425232	-	2.400.000
	425233	-	22.000.000
	425239	-	29.000.000
	<b>Total</b>	<b>42.400.000</b>	<b>53.400.000</b>

3. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor: W14-A11/188/KP.00.2/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor: W14-A11/305/KU.01/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Perubahan Susunan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Galih Triatmojo, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Herry Andrianto, ST.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Hardiyanto, S.Kom.
Staf Pengelola	: R. Ilyas, S.Ag.
Bendahara Pengeluaran	: Istiqamah
Bendahara Penerimaan	: Roni Kurniawan, S.Kom.

# DAFTAR LAMPIRAN





**LAMPIRAN A.1**  
**TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2019**

KODE	URAIAN	MM	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D. PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOTAL AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
TIDAK ADA PENYUSUTAN ASET									

**LAMPIRAN A.2**  
**TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**SEMESTER I TA. 2019**

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/ Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
TIDAK ADA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan																

**LAMPIRAN A.3**  
**TABEL DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA**  
**SEMESTER I TA. 2019**

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
TIDAK ADA DAFTAR HIBAH LANGSUNG							